

KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF MOHAMMAD HATTA DAN ISLAM

Andi Andri

Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: andiandri@gmail.com

Abstract: The problem in this research is 1. how is the independence and sovereignty of the people according to Mohammad Hatta? 2. How is the independence and sovereignty of the people in the perspective of Islam? 3. How is the independence and sovereignty of the people according to Mohammad Hatta and the Islamic perspective?. To answer the problem of research above is done library research (library research), by using qualitative descriptive approach. The model of this research is the research of character thinking. Independence and People's Sovereignty In Perspective Mohammad Hatta And Islam is a study that uses qualitative-inductive methods. Results of research on Independence and People's Sovereignty In Perspective Mohammad Hatta And Islam, Declaring 1) Independence according to Mohammad Hatta that eliminates all forms of colonization of a nation. While the sovereignty of the people in his view, the ultimate power lies in the people so that the position of the people together with the king, it can be realized by way of education for the people so that people are aware of the sovereignty and will never disarm their own sovereignty, and with a clever community there will be no group that can disarm the people's sovereignty. 2) Independence in the Islamic concept of self-liberation from ignorance, apostasy and tyranny of the ruler. While the sovereignty of the people in Islam that sovereignty lies only belonging to God alone, but in this case the people also have sovereignty which sovereignty is a deposit from God, through the sovereignty of the people that humans are entitled to choose their representatives in leading the State in order to obtain welfare for the community itself. 3) Mohammad Hatta's concept of freedom and sovereignty of the people has a harmony with the concept of Islam related to independence at its core called independence, namely the escape of the good colony in the form of apostasy, ignorance and kezhaliman of the ruler. While the sovereignty of the people is just different from the way to see the nature of the owner of power, because in the concept of Islam the real power in a State is God. While the Sovereignty of the Community is a reflection of the power of God.

Keywords: Independence, People's Sovereignty, and Islam

Abstrak: Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta? 2. Bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dalam perspektif Islam?. 3. Bagaimana Kemerdekaan dan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta dan perspektif Islam?. Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas dilakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Model penelitian ini adalah penelitian pemikiran tokoh. Kemerdekaan Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad Hatta Dan Islam merupakan penelitian yang menggunakan Metode kualitatif-induktif. Hasil penelitian tentang Kemerdekaan Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad Hatta Dan Islam, Menyatakan 1) Kemerdekaan menurut Mohammad Hatta yakni menghilangkan semua bentuk penjajahan dari suatu bangsa. Sedangkan kedaulatan rakyat dalam pandangannya, yakni kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat sehingga kedudukan rakyat sama dengan raja, hal tersebut bisa terwujud dengan cara melakukan pendidikan bagi rakyat agar rakyat sadar akan kedaulatan tersebut dan tidak akan pernah melucuti kedaulatan mereka sendiri, serta dengan masyarakat yang pandai tersebut tidak akan ada kelompok yang bisa melucuti dari kedaulatan rakyat tersebut. 2) Kemerdekaan dalam konsep Islam yakni pembebasan diri dari kebodohan, kesesatan dan kezhaliman dari penguasa. Sedangkan Kedaulatan rakyat dalam Islam yakni kedaulatan terletak hanya milik tuhan semata, namun dalam hal ini masyarakat juga memiliki kedaulatan yang mana kedaulatan tersebut merupakan titipan dari Tuhan, melalui

kedaulatan rakyat inilah manusia berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam memimpin Negara demi mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. 3) Konsep pemikiran Mohammad Hatta tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat memiliki keselarasan dengan konsep Islam terkait kemerdekaan pada intinya yang disebut dengan kemerdekaan yakni terlepasnya dari jajahan baik itu berupa kesesatan, kebodohan dan kezhaliman dari penguasa. Sedangkan kedaulatan rakyat sama saja hanya berbeda dari cara melihat hakikat pemilik kekuasaan tersebut, karena dalam konsep Islam kekuasaan sesungguhnya dalam suatu Negara adalah Allah. Sedangkan Kedaulatan yang dimiliki oleh Masyarakat merupakan cerminan dari kekuasaan Allah.

Kata kunci: Kemerdekaan, Kedaulatan Rakyat, dan Islam

Pendahuluan

Kedaulatan bagi sebuah negara adalah sangat penting sekali. Negara yang sudah merdeka berarti itu sudah memiliki kedaulatan, oleh karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa di dunia dan merupakan hak asasi setiap manusia di dunia. Bangsa Indonesia mengutuk dan anti penjajahan seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama.

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bisa menentukan nasib bangsanya sendiri (otonom), tanpa intervensi negara mana pun. Indonesia melalui konstitusi yang sudah ada sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, selalu membicarakan kedaulatan, baik kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, maupun kedaulatan negara. Dalam catatan sejarah Indonesia mengalami berbagai level sebuah kedaulatan¹,

pernah mengalami masa di mana praktek kenegaraan digoncang habis-habisan hingga hampir luluh lantah oleh penjajah Belanda, hingga harus mengikutkan diri dalam konsep penjajah pada tahun 1949 menjadi negara federal. Namun semangat juang rakyat pada saat itu demi memperjuangkan kemerdekaan, maka 7 bulan setelah itu dikembalikan bentuk negara menjadi negara kesatuan, Bhineka Tunggal Ika.²

Integrasi bangsa untuk menuju ke arah kemerdekaan bukan merupakan hasil rekayasa dan bantuan serta rasa 'iba' dari penjajah, namun merupakan bentuk perjuangan yang menganggap kemerdekaan dan kebebasan rakyat dan bangsa adalah hak paling esensial dan fundamental bagi umat manusia. Posisinya sederajat dengan nilai-nilai universal lainnya seperti kemanusiaan (humanisme) dan keadilan. Hak tersebut juga berlaku bagi bangsa Indonesia, namun karena sering dilanggar bangsa lain, bangsa Indonesia harus berjuang keras mewujudkan hak tersebut. Keberhasilan mewujudkan hak kebebasan dan kemerdekaan ditandai oleh pernyataan kemerdekaan.³

Karena misi utama perjuangan kemerdekaan adalah bagaimana merealisasikan nilai-nilai kebebasan bagi rakyat dan bangsa, maka negara yang telah diperjuangkan itu seharusnya berkomitmen mewujudkan nilai-nilai tersebut.

¹ Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1530-1596). Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh undang-undang. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus. Kedaulatan atau sovereignty

adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa sovereignty itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Perkataan sovereignty (bahasa Inggris) mempunyai persamaan kata dengan Souverenteit (bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau sovereignty itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara. Lihat J. Von Schmid, Ahli-ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1962), h. 140-143

² Turita Indah Setyani, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa. (Jakarta: 2000), h. 2-3

³ As'ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009). h. 103

Karena itu, mengutip alinea kedua Pembukaan UUD 1945: "... negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur" harus dijaga dan dilestarikan terus menerus. Sudah menjadi kewajiban negara Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 untuk selalu menjaga kemerdekaan dan kebebasannya. Kemerdekaan memiliki makna bila bangsa ini mandiri dan menentukan sikap dalam mengejar tujuan-tujuan negara. Kemandirian bangsa atau 'berdaulat' sebagai terjemahan makna kemerdekaan, adalah pesan penting yang harus selalu ditanamkan dan ditegakkan, khususnya dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia.⁴

politik yang menjamin kebersamaan dan terlayannyaberbagai kepentingan.⁵ Menarik jika melihat ke belakang, yaitu sejarah nabi Muhammad yang telah membangun demokrasi melalui konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Yang mana Piagam madinah merupakan undang-undang buatan Nabi Muhammad yang diciptakan untuk merekonsiliasi umat manusia saat itu, terutama dikalangan Muhajiri, Anshar, Yahudi, di samping itu masyarakat Arab yang dikenal sukuistik, diarahkan pada integritas kepentingan.

Dengan pemahaman tersebut, Piagam Madinah dapat di tafsirkan sebagai wujud dari upaya politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menginduksikan berbagai kepentingan sosial politik yang pluralistik, kemajemukan suku-suku di Arab, agama yang berbeda-beda, dan kepentingan politik, diintegrasikan melalui Piagam Madinah. Oleh karena itu Piagam Madinah merupakan alat demokratisasi.⁶

Dari Piagam Madinah di atas maka kita beralih kepada Setelah Indonesia merdeka maka semenjak itu Hatta berperan aktif memimpin negara RI sebagai wakil presiden, dan dalam keadaan yang sangat sulit Hatta harus merangkap sebagai Perdana Menteri tahun 1948-1949. Politik yang diperjuangkannya akhirnya mencapai tujuan dengan diakuinya Indonesia sebagai negara berdaulat yang terdiri atas bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1950. Pada waktu Republik Indonesia Serikat berdiri, Hatta yang menjadi Perdana Menteri

pertama dan terakhir. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sesuai amanat proklamasi, Hatta terpilih sebagai wakil presiden oleh parlemen.⁷ Beranjak dari kenyataan di atas, tulisan ini bertujuan menganalisis pemikiran Hatta tentang kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dalam perspektif Islam.

Mohammad Hatta sebagai seorang pergerakan, pejuang, politikus dan proklamator banyak memberikan sumbangsuhnya untuk kemerdekaan Indonesia. Semasa kecilnya ia sudah melihat dan merasakan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan ketertindasan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh penjajah. Karena latar belakang itulah yang menyebabkan terbukanya hati nuraninya untuk mewujudkan Indonesia merdeka, baik dengan pikiran, tenaga bahkan jiwa dan raganya.⁸

Ketertindasan ini dirasakan karena kurang bersatunya rakyat Indonesia dalam melawan penjajah itu sendiri. Oleh karena itu langkah awal yang diambil Mohammad Hatta dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan pergerakan dan organisasi politik sebagai wadah pemersatu.⁹

Menurut Hatta Kebangsaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan terikat dengan suatu tanah air atau suatu wilayah. Kandungan utama dalam perasaan tersebut adalah kesamaan nasib dan pengalaman sejarah, bukan etnis, agama, atau sekat-sekat primordial lainnya. Menurut Hatta, kebangsaan identik dengan cinta tanah air atau dalam bahasa kontemporer sekarang lebih ke Indonesiaan. Menurut Hatta, selama masih adapenjajah, selama itu diperlukan kebangsaan, merdeka berarti membangun kebangsaan.¹⁰

"...Membangunkan semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka, artinya membangun kemanusiannya. Selanjutnya membangkitkan kegembiraannya dan keberanian menentang maut, sudi menderita sakit yang sesakit-sakitnya, seperti yang

⁴ As'ad Said Ali, Negara Pancasila..., h 103

⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqih siyasah pengantar Ilmu Politik Islam. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 134

⁶ Beni Ahmad Saebani, Fiqih..., h. 134-135

⁷ Hatta, Kumpulan Karangan Jilid I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h.20

⁸ Rikard Bagum, Bung Hatta, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 15

⁹ I. Wangsa Widjaja, Mengenang Bung Hatta, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), cet. ke-2, h. 30

¹⁰ Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan Jilid I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 91

dapat dialami sewaktu perang besar 1914-1918. Bagaimana juga bodoh dan penakut orang, pada suatu saat yang penting ia sudi berkorban hendak membela Tanah Airnya".¹¹

Semangat kebangsaan dapat juga disalahgunakan oleh golongan intelektual, dalam hal ini golongan intelektual yang berambisi terhadap kekuasaan. Sama halnya dengan kaum feodal yang mengandalkan hak historis mereka untuk berkuasa. Golongan intelektual mengandalkan keterdidikan mereka sebagai sumber legitimasi kekuasaan setelah Indonesia merdeka. Golongan intelektual ini berpendapat rakyat pada umumnya masih bodoh dan belum paham tentang cara-cara melaksanakan pemerintahan sendiri dan pembangunannya. Inilah anomali kebangsaan yang oleh Hatta disebut "kebangsaan cap-intelek". Sedangkan Hatta menegaskan, yang dituju oleh Pendidikan Nasional Indonesia adalah "kebangsaan cap-rakyat".

"Karena rakyat itu badan jiwa bangsa. Dan rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendah drajat kita. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka semua itu tergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dari golongan terpelajar baru ada berarti, kalau disampingnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya".¹²

Kerakyatan merupakan asas yang kedua dari Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta membangun kerakyatan dalam rangka membangun Indonesia merdeka. Menurut Hatta, kerakyatan berarti kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. Istilah ini, bagi Hatta lebih obsesif dibandingkan dengan istilah "demokrasi". Hatta juga menyisipkan, yang dimaksud dengan rakyat di sini adalah rakyat yang terdidik, dengan didikan tersebut maka rakyat akan menjadi sadar akan harga diri, hak dan kewajibannya. Dengan didikan tersebut, rakyat juga akan memiliki tanggungjawab dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri melalui musyawarah atau mufakat di dalam bermasyarakat. Hatta juga membayangkan rakyat Indonesia yang menjadi daulat atas dirinya sendiri, bukan rakyat yang bodoh, terbelakang dan bertindak patuh dan mematuhi saja perintah penguasa.

Dengan hal tersebut, Hatta senantiasa berbicara tentang arti penting pendidikan bagi rakyat, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat, agar rakyat mampu mengetahui hak dan kewajiban dan menggunakan secara bertanggung jawab. Begitulah Hatta yang menganggap pentingnya arti pendidikan bagi rakyat, dan Hatta juga menambahkan, tugas untuk mendidik rakyat berada di tangan para pemangku atau pejabat pemerintahan.

Agar para pejabat pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar Indonesia merdeka. Kebenaran di sini yaitu, dalam arti stabil dan kuat bertahan dalam menghadapi setiap gangguan inkonstitusional, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam hal inilah Hatta mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat.

Pertama, diasumsikan, disamping berdaulat, rakyat juga bertanggung jawab terhadap kedaulatan yang diembannya. Kedua, rakyat yang berdaulat tidak mungkin melucuti kedaulatan sendiri.¹³

Namun dalam realita pada saat sekarang ini, kedaulatan rakyat Indonesia justru tidak berjalan sebagaimana mestinya, para wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan rakyat, tetapi justru para wakil rakyat yang mencari kesejahteraan mereka masing-masing, sedangkan masyarakat justru menderita. Artinya wakil rakyat yang dipilih dengan mengatasnamakan rakyat justru tidak pro terhadap rakyat.

Dari hal tersebut di atas maka penulis ingin meneliti tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat menurut Muhammad Hatta di tinjau dari perspektif Islam, karena hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bahwa pada saat sekarang ini masyarakat sudah berdaulat atau belum. Dan apakah konsep pemikiran Hatta tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat sudah sesuai dengan kajian Islam. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang

¹¹ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. (Jakarta, Kompas, 2010), h. 194

¹² Zulfikri Suleman, *Demokrasi...*, h. 197

¹³ Zulfikri Suleman, *Demokrasi...*, h. 198-200

kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Negara Indonesia pada saat sekarang.

Selain itu perlu dibahas juga dalam pembahasan ini nanti, yakni bagi Hatta, pemikiran sumbangan Islam dalam kehidupan bernegara terletak pada kelembagaannya. Di samping itu bagi Hatta, sumbangan Islam dalam kehidupan bernegara terletak, pada terwujudnya tatanan demokrasi yang damai, berkeadilan dan penuh persaudaraan antar umat manusia. Negara pengurus demokrasi sosial adalah titik pertemuan Islam dan negara dalam pandangan Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar penelitian dapat terfokus dan terarah, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dalam perspektif Mohammad Hatta?
2. Bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dalam perspektif Islam?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta dan Perspektif Islam.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang mengkaji objek material karya-karya, sumber datanya dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian tersebut.¹⁴

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif-induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan induktif adalah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang dimulai dari pernyataan-pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sesuai dengan obyek penelitian filsafat pada umumnya, metode ini memaparkan data

berdasarkan kajian kebudayaan sebagai obyek kajian filsafat yang lebih menghendaki arah bimbingan teori substantive yang berasal dari data.¹⁵

2. Model Penelitian Filsafat

Model penelitian ini adalah penelitian pemikiran tokoh. Penulis mengikuti cara dan arah pikiran seorang tokoh, filsuf yang dijadikan topik penelitian. Karena tokoh itu sendiri dengan berpikir filosofis sudah mempergunakan segala unsur metode umum yang berlaku bagi pemikiran filsafat mempunyai gaya secara khas, maka penulis hanya mengikuti alur pemikiran tokoh tersebut. Penulis mengambil pemikiran seorang tokoh yang bernama Mohammad Hatta tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dalam perspektif Islam.

Pola tahap awal dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan. Langkah pertama mencari buku mengenai tokoh dan topik yang bersangkutan. Kemudian bahan dicari dalam buku-buku umum, sejarah filsafat, ensiklopedi dan juga materi kamus filosofis. Juga dapat dibaca dalam buku sistematis dan buku tematis, seperti filsafat manusia, filsafat sosial. Dalam buku tersebut biasanya ditunjukkan kepustakaan yang lebih luas.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber data primer penelitian ini adalah buku yang ditulis sendiri oleh Mohammad Hatta seperti, *Demokrasi Kita Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. *Demokrasi Kita, Bebas Katif, Ekonomi Masa Depan. Menuju Gerbang Kemerdekaan. Berjuang dan Dibuang. Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Jejak Yang Melampaui Zaman*. Sedangkan sumber skunder dalam penelitian ini adalah karya-karya lain yang mengangkat tema kemerdekaan dan kedaulatan rakyat baik menurut Mohammad Hatta maupun tokoh-tokoh lain serta tulisan-tulisan lain mengenai Mohammad Hatta seperti: Buku karya Sritua Arief, "Ekonomi Kerakyatan

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 138

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98

Indonesia : Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesai”.Buku karya Salman Alfarizi, Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980. Dan Buku Karya Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta, karya Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa, Sri Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data atau variabel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, baik data itu berupa buku, catatan, artikel atau majalah-majalah jurnal, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Data-data yang dikumpulkan tersebut meliputi data primer dan juga data skunder yang termuat di media cetak maupun internet. Setelah itu penulis menyusun beberapa poin atau ide yang akan dituangkan dalam tulisan.¹⁷

5. Teknik Analisa Data

Pada tahapan ini, cara yang penulis tempuh yaitu dengan memberikan gambaran konseptual tentang objek kajian penelitian secara sistematis sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Penulis menganalisa data dengan deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah metode pembahasan dengan cara berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.¹⁸

Pembahasan

A. Kemerdekaan Menurut Mohammad Hatta

1. Pengertian Kemerdekaan

Merdeka memiliki arti (1) bebas dari perhambaan dan penjajahan, (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan, (3) tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Sedangkan kemerdekaan memiliki arti keadaan (hal) berdiri sendiri yakni bebas, lepas dan tidak terjajah lagi. Dalam arti sebuah kebebasan, yang

mana kebebasan adalah hak segala bangsa.¹⁹

Merdeka adalah terbebas dari segala macam belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat sekehendaknya. Dalam sebuah negara, merdeka berarti bebas dari belenggu, kekuasaan dan aturan penjajah. Merdeka dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah merdeka tanpa syarat dan kedua adalah merdeka bersyarat.

Merdeka Bersyarat Merdeka bersyarat adalah merdeka namun masih dibatasi oleh syarat atau aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya. Negara yang merdeka bersyarat bebas menentukan, memutuskan, ataupun melakukan apa saja asalkan tidak melanggar aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemerdekaan merupakan sesuatu yang amat penting dalam suatu Negara, karena dengan kemerdekaan tersebut dapat memberikan kebebasan baik dalam bertindak yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dengan kebebasan tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi warga Negara yang telah merdeka karena tidak lagi terbelenggu dan diperbudak oleh Negara maupun orang lain lagi. Artinya kemerdekaan merupakan sesuatu yang teramat penting bagi suatu bangsa, karena dengan kemerdekaan tersebut tidak akan ada penindasan, justru yang akan timbul adalah kebahagiaan karena mereka telah memiliki sebuah kebebasan.

2. Unsur-unsur Negara

Secara global suatu Negara membutuhkan tiga unsur pokok, yakni rakyat (masyarakat/warganegara), wilayah dan pemerintah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami unsur-unsur pokok dalam suatu Negara, maka penulis akan menjelaskan masing-masing unsur tersebut, yakni:

a. Rakyat (Masyarakat/WargaNegara)

Setiap Negara tidak mungkin bisa ada tanpa adanya warga atau rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah Negara, karena

¹⁷ Anwar Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 92

¹⁸ Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 162-163

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 577

secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar Negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimanapun juga manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi (Negara).²⁰

Tepatlah bila sosiolog mengatakan bahwa Negara adalah kelompok persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan seperjuangan. Jadi, jika membicarakan Negara, maka yang sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia membentuk kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat disebabkan karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat Aristoteles, dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat adalah merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu.²¹

b. Wilayah

Wilayah dalam sebuah Negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batasan-batasan teritorial yang jelas.²² Konsekuensi dari suatu wilayah yang telah didaulat (dikukuhkan) menjadi suatu Negara, adalah Negara tersebut berdaulat sepenuhnya untuk mendiami dan mengelolah wilayah tersebut. Oleh karena itu, bila ada manusia lain yang memasuki wilayah suatu Negara, tanpa sepengetahuan apalagi tanpa seizin Negara yang bersangkutan terlebih dahulu, maka tindakan itu dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Tidak jarang masalah wilayah ini menimbulkan peperangan di antara dua Negara yang berbatasan wilayah.²³

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali menjadi

personifikasi sebuah Negara.²⁴ Selain itu pemerintahan dapat pula diartikan seseorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Suatu masyarakat yang anarchitis bukan termasuk Negara. Menurut Lauterpacht malah menyatakan bahwa pemerintah merupakan syarat utama untuk adanya suatu Negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi Negara boneka atau Negara satelit dari suatu Negara lainnya, maka Negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Negara.²⁵

Teori Terbentuknya Suatu Negara

Negara terjadi atau terbentuk karena proses yang terjadi bertahap Negara tersebut, sebagaimana dengan teori terbentuknya Negara berikut ini:²⁶

1. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori yang terpenting mengenai asal usul Negara

2. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan ini dikenal juga dengan doktrin teokratis dalam teori asal mula Negara. Teori ini pun bersifat universal dan ditemukan baik di dunia Timur maupun dunia Barat, baik di dalam teori maupun dalam praktik. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori itu untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak.

3. Teori Kekuatan

Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan penduduk dari suatu kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Dalam teori ini pula kekuatan membuat hukum (might makes

²⁰ Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Cet. I, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah), h. 45

²¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Cet. I, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h. 3

²² Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h. 45

²³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara..., h. 4

²⁴ Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h. 46

²⁵ Huala Adolf, Aspek-Aspek..., h. 4

²⁶ Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h. 47

right). Kekuatan adalah pembenarannya dan *raison d'être*-nya Negara.

4. Teori Organik

Konsepsi organik tentang hakikat dan asal mula Negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan Negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Doktrin organik dari segi isinya dapat digolongkan kedalam teori-teori organism moral, organism psikis, organisme biologis dan organisme sosial.

5. Teori Historis

Teori historis atau teori evolusionistik (*gradualistic theory*) merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu dan tuntutan-tuntutan zaman.

Mengenai teori terjadinya dan pertumbuhan Negara, menurut Abu Daud Busroh dan Pantja Astawa menyatakan, bahwa terdapat dua sisi pembahasan yaitu terjadinya Negara melalui peruses primer dan sekunder, sebagaimana berikut ini:²⁷

Terjadinya Negara Secara Primer (*Staats Wording Primaire*)

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya Negara tidak dihubungkan dengan Negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya Negara secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju, menurut teori ini perkembangan Negara secara primer melalui fase:

1) Fase *Genootschap* (*Genossenschaft*)

Fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat

hukum tertentu(suku). Suku sangat terkait dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku (kepala suku atau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.

2) Fase *Reich* (*Rijk*)

Pada fase ini orang-orang yang menggabungkan diri setelah sadar akan hak milik atas tanah sehingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodalisme. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari *primus inter pares* menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.

3) Fase *Staat*

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada suatu kelompok. Pada awalnya Negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan sistem pemerintahan tersentralisasi dan semua rakyat dipaksa mematuhi semua kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur daripada Negara ialah bangsa. Wilayah dan pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi.

4) Fase *democratische Natie* dan Fase *Diktator*

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase *staat*, di mana *democratische Natie* ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kesadaran adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, di mana kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran ini mendorong lahirnya Negara demokrasi.

²⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Cet. I, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h. 9-12

3. Kemerdekaan Menurut Hatta

Menurut Mohammad Hatta kebangsaan identik dengan cinta tanah air atau dalam bahasa kontemporer sekarang lebih ke Indonesiaan. Menurut Hatta, selama masih ada penjajah, selama itu diperlukan kebangsaan, merdeka berarti membangun kebangsaan.²⁸ Menurut Mohammad Hatta tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Apa yang mau dimerdekan dari diri sendiri? Cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka dapat bersaudara. Pergerakan kemerdekaan mestilah bersifat kebangsaan.²⁹

Cinta bangsa dan tanah air sudah menjadi nyanyian yang merdu ditelinga orang banyak, terutama bagi bangsa yang tidak merdeka, karena bangsa itu menjadi ukuran manusia dalam pergaulan internasional. Kalau satu bangsa mulia dan tinggi derajatnya, orangnya pun dihargai pula. Kalau seseorang tidak mempunyai kebangsaan, seperti anak jajahan, ia tidak akan dipandang orang dalam pergaulan internasional. Keadaan ini lah yang mengharuskan kita membangkitkan rasa bangsa, semangat kebangsaan.³⁰

Menurut Mohammad Hatta jika kaum ningrat menyebut Indonesia merdeka, maka yang terbayang di pikiran mereka suatu Indonesia yang terlepas dari tangan belanda tetapi takluk kebawah kekuasaan mereka.³¹ Sebenarnya yang ingin diberikan oleh Hatta yakni kemerdekaan bukan hanya sekedar terlepas dari jajahan Belanda saja, tetapi masyarakat Indonesia juga harus melepaskan diri dari jajahan para kaum ningrat yang berusaha menguasai diri mereka, ini lah yang membuat Hatta terus mendengungkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan memberikan pendidikan kepada rakyat, agar rakyat menjadi sadar akan arti dari kemerdekaan.

B. Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta

1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat di ambil dari kata daulat yang berarti kekuasaan dan pemerintahan.

Sedangkan berdaulat memiliki arti mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara dan daerah. Bila kita melihat makna kedaulatan rakyat maka dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah terletak pada rakyat, demokrasi.³²

Selain itu kedaulatan berasal dari akar kata bahasa Arab daulat atau daulatan atau dulatan yang dalam makna asalnya berarti pergantian atau peredaran. Dalam Al-Quran kata daulah ini dipergunakan dua kali atau dua tempat. Pertama menggunakan bentuk kerja nudawiluha dan kedua menggunakan kata kerja dulatan. Kalau dalam ayat pertama terkandung muatan yang berkonotasi politik, sedangkan ayat yang kedua muatannya lebih berkonotasi ekonomi. Keterangan ini dapat dijadikan suatu titik tolak dalam menganalisis implementasi dari konsep kedaulatan dalam kehidupan kenegaraan.³³

Pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu:³⁴

Pertama, permanen yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri. Kedua, Asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Keempat, Tak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-16 oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de la Republique*. Dalam bukunya beliau menguraikan konsep mengenai kedaulatan sebagai berikut:³⁵

a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kuasa yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada kekuasaan lain yang lebih tinggi.

²⁸ Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan Jilid I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 91

²⁹ Mohammad Hatta, Demokrasi kita, (Bandung: Sega Arsy, 2014), h. 12

³⁰ Mohammad Hatta, Demokrasi..., h. 13

³¹ Mohammad Hatta, Demokrasi..., h. 19

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus..., h.

³³ Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 78

³⁴ Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya, (Bandung: 2006), h. 41-42

³⁵ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 95

- b. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.
- c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Konsep kedaulatan bersifat unite dalam arti, semangat dan kemauan umum rakyat adalah suatu kesatuan dan dengan kesatuan itu mereka berhak memerintah dan menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu, Negara juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah-pecah (Indivisible). Jika yang berdaulat adalah raja, maka rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Jika rakyat berdaulat, berarti rakyatlah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi bukan yang lain. Karena itu, kedaulatan tak dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (Inalienable). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun menurun, sehingga kedaulatan tidak dapat berubah-ubah (imprescriptable).³⁶

Oleh karena itu, konsep kedaulatan dewasa ini haruslah dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi. Untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ada didalam negara maka ada macam-macam teori kedaulatan

a. Kedaulatan Tuhan

Dalam ide Kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dianggap ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan manusia di dunia. Manusia hanya lah pelaksana belaka dari kehendak Tuhan. Dapat dikatakan bahwa pengertian demikian ini dikenal ada dalam atau oleh semua agama besar dunia dalam sejarah. Agama Hindu, agama Yahudi, Kristen, maupun Islam mempunyai pengalaman yang sama dalam berhubungan dengan ide-ide tentang kekuasaan bernegara. Tuhan lah yang pertama-tama dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan manusia, termasuk dalam urusan bernegara.³⁷

b. Kedaulatan Raja.

Konsep Kedaulatan Raja sama tuanya dengan gagasan Kedaulatan Tuhan. Bahkan sampai

abad ke-6, semua negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat turun temurun, yang biasa disebut sebagai Raja atau Ratu. Negara pertama yang tercatat melakukan suksesi kepemimpinan tidak melalui hubungan darah hanya di zaman sepeninggal nabi Muhammad saw yang kemudian digantikan oleh Khalifah Abubakar Shiddiq, dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab, Usman ibn 'Affan, dan terakhir Ali ibn Abi Thalib sebelum akhirnya kembali lagi ke sistem kerajaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Madinah selama periode keempat khalifah inilah yang disebut sebagai negara yang berbentuk republik yang murni sebagaimana yang diidealkan oleh Plato di zamannya.³⁸

c. Kedaulatan Rakyat

Teori ini di pelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang mengemukakan teori bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Raja atau kepala negara itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diukuuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundangan-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Dengan demikian undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.³⁹

d. Kedaulatan Hukum

Konsep terakhir ialah kedaulatan hukum yang mengandaikan bahwa pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah figur atau tokoh, tetapi sistem aturan. Manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. Karena itu, teori kedaulatan hukum itu menurut tradisi Anglo-

³⁶ Yusdani, Fiqih Politik..., h. 82

³⁷ Yusdani, Fiqih Politik..., h. 83

³⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 87-88

³⁹ Yusdani, Fiqih Politik..., h. 80

Amerika diistilahkan dengan 'the rule of law, not of man', pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang; kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang per orang.⁴⁰

2. Kedaulatan Rakyat Menurut Hatta

Menurut Mohammad Hatta kedaulatan Rakyat merupakan sesuatu yang teramat penting dalam suatu bangsa, sebegitu pentingnya hal tersebut maka Mohammad Hatta bukan hanya sekedar memahaminya tetapi memiliki pengaruh pada diri Hatta yang menyebabkan ia bukan saja setuju dengan kedaulatan rakyat, justru yang menyebabkannya memperjuangkannya. Sikap ini dipengaruhi oleh dua hal yakni: 1) ajaran agama Islam dan 2) adat istiadat yang dibiasakan khususnya di Minangkabau yang terkenal dengan negeri beradat.⁴¹

Dalam pandangan Mohammad Hatta demokrasi atau kedaulatan rakyat itu tidak akan terwujud sekedar dengan kata-kata, pidato dan tulisan. Penegakan faham ini menurut pendapatnya, hanya akan terwujud dengan pendidikan. Apalagi karena kedaulatan rakyat itu, menurut pendapatnya, tidak sama dengan anarki, asal bicara, asal menolak asal berbuat menurut sekendak hati. Menurut Hatta pemahaman lebih diperlukan untuk perjuangan politik, rakyat jangan hanya bersemangat waktu rapat umum, tetapi lebih penting agar rakyat konsisten dalam berjuang. Konsisten ini menurutnya hanya terujud dengan pendidikan dan kaderisasi.⁴²

Pemikiran Mohammad Hatta tentang kedaulatan rakyat bisa dilihat dari pidato Hatta tentang rakyat di Indonesia, disampaikannya ketika ia berkunjung ke Republik Rakyat Cina tahun 1957. Dalam pidatonya itu ia menyampaikan tiga macam pengaruh pada penerimaan dan penegakan kedaulatan rakyat oleh pergerakan nasional di Indonesia, ketiga macam pengaruh itu yakni:

1. Kebiasaan hidup gotong royong dan khususnya rapat di desa. Walaupun kerajaan Jawa lebih cenderung bersifat otoriter (dengan pengakuan raja sebagai wakil dewa), tetapi

kehidupan desa mencerminkan betapa rakyat desa berdaulat. Ini terlihat dari rapat bersama yang sering diadakan dalam rangka memperbaiki kehidupan desa, adanya hak pepe (protes) yang memungkinkan rakyat desa berdemonstrasi ke alun-alun untuk mengemukakan pendapatnya yang menolak suatu atau ketentuan penguasa.

2. Ajaran Islam yang menekankan musyawarah, di daerah yang pengaruh Islamnya kuat, walaupun memiliki raja, namun raja tidaklah dapat berbuat semena-mena, karena raja yang adil maka raja di sembah sedangkan raja yang zholim maka raja disanggah.
3. Faham sosialisme demokrasi yang menolak kapitalisme dan liberalisme. Faham ini lebih banyak masuk Indonesia terutama sesudah banyak mahasiswa Indonesia belajar di negeri Belanda. Faham ini berbeda dari sosialisme yang merupakan tahapan ke komunisme, sosialisme sebagai tahapan kekomunisme bersifat diktatur. Organisasi mahasiswa itu, perhimpunan Indonesia, terutama dengan pimpinan Hatta tahun 1926-1930 memperjuangkan faham ini dalam rangka pergerakan nasional.

Selain itu menurut Hatta, Karena rakyat itu badan jiwa bangsa. Dan rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendah drajat kita. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka semua itu tergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dari golongan terpelajar baru ada berarti, kalau disampingnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya.⁴³

Kerakyatan merupakan asas yang kedua dari Pendidikan Nasional Indonesia. Hatta membangun kerakyatan dalam rangka membangun Indonesia merdeka. Menurut Hatta, kerakyatan berarti kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. Istilah ini, bagi Hatta lebih obsesif dibandingkan dengan istilah "demokrasi". Hatta juga menyisipkan, yang dimaksud dengan rakyat di sini adalah rakyat yang terdidik, dengan didikan tersebut maka rakyat akan menjadi sadar akan harga diri, hak dan kewajibannya. Dengan didikan tersebut, rakyat juga akan memiliki tanggungjawab dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar..., h. 9

⁴¹ Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat Memperingati Satu Abad Bung Hatta, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 355

⁴² Sri-Edi Swasono, Bung Hatta..., h. 358-359

⁴³ Zulfikri Suleman, Demokrasi..., h. 197

melalui musyawarah atau mufakat di dalam bermasyarakat. Hatta juga membayangkan rakyat Indonesia yang menjadi daulat atas dirinya sendiri, bukan rakyat yang bodoh, terbelakang dan bertindak patuh dan mematuhi saja perintah penguasa.

Dengan hal tersebut, Hatta senantiasa berbicara tentang arti penting pendidikan bagi rakyat, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat, agar rakyat mampu mengetahui hak dan kewajiban dan menggunakan secara bertanggung jawab. Begitulah Hatta yang menganggap pentingnya arti pendidikan bagi rakyat, dan Hatta juga menambahkan, tugas untuk mendidik rakyat berada di tangan para pemangku atau pejabat pemerintahan.

Agar para pejabat pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar Indonesia merdeka. Kebenaran di sini yaitu, dalam arti stabil dan kuat bertahan dalam menghadapi setiap gangguan inkonstitusional, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam hal inilah Hatta mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat.

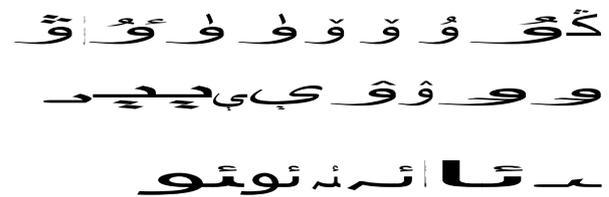
Pertama, diasumsikan, disamping berdaulat, rakyat juga bertanggung jawab terhadap kedaulatan yang diembannya. Kedua, rakyat yang berdaulat tidak mungkin melucuti kedaulatan sendiri.⁴⁴

Dengan demikian sangat jelas bahwa pemikiran Mohammad Hatta terkait dengan kedaulatan rakyat, menurut Hatta kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, karena kedaulatan merupakan milik rakyat maka rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Dan masyarakat juga harus sadar akan pentingnya kedaulatan yang mereka miliki, dengan diberikan pendidikan kepada mereka maka mereka akan bias mempertahankan dan menjunjung tinggi kedaulatan tersebut dan bukan melucuti dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

C. Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam

1. Dalil Al-Quran Yang Berkaitan Tentang Kedaulatan

Ayat yang membicarakan tentang kedaulatan terdapat dalam QS. Ali Imran/3:140:



“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada’. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”

2. Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Dalam Islam

a. Kemerdekaan Dalam Perspektif Islam

Kemerdekaan dalam perspektif Islam bisa dilihat dari penjelasan dalil-dalil yang terdapat dalam firman Allah yang menerangkan tentang kemerdekaan itu sendiri. Seperti halnya pada surat Al-A’raf ayat 127, Al-Baqarah ayat 49, Ibrahim ayat 6, dan Al-Maidah ayat 3. Yang mana kesemua ayat ini membicarakan tentang kemerdekaan yang dilakukan oleh para utusan Allah.

Kemerdekaan yakni mencari suatu titik kebenaran yang mana selama ini seseorang terbelenggu dengan sikap yang salah dan penuh dengan kesesatan. Artinya kemerdekaan sesungguhnya adalah keluar dari semua bentuk kesesatan dan ke zhaliman. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana nabi sulaiman mencari kebenaran dengan cara mencari Tuhan yang sebenarnya yakni Allah, karena pada saat itu para penduduk disana menuhankan berhala. Hingga akhirnya nabi sulaiman berhasil memerdekakan dirinya dari belenggu kesesatan yang sudah turun temurun dilakukan oleh bangsanya pada saat itu yang selalu menyembah berhala buatan mereka sendiri.

Namun yang perlu dipahami bahwa seluruh kebebasan atau kemerdekaan yang dicapai oleh

⁴⁴ Zulfikri Suleman, Demokrasi..., h. 198-200

seseorang atau suatu bangsa tidak akan bisa terwujud tanpa adanya campur tangan tuhan, hal ini terlihat dari Firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah lah yang telah melepaskan mereka dari berbagai bentuk kesesatan dan kezhaliman. Jadi tugas dari seseorang atau suatu kaum setelah mendapatkan kemerdekaan yakni mereka harus banyak-banyak bersyukur atas kenikmatan berupa kemerdekaan atau kebebasan itu.

b. Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam

Bila membicarakan tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam perspektif Islam maka bisa di lihat melalui sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw. Yang mana Rasul membangun demokrasi melaui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Yang Piagam Madinah merupakan undang-undang buatan Nabi yang diciptakan untuk merekonsiliasi umat manusia saat ini, terutama dikalangan Muhajirin, Anshar dan Yahudi di samping itu, masyarakat Arab yang dikenal sukuistik, diarahkan pada integritas kepentingan politik yang menjamin kebersamaan dan terlayannya berbagai kepentingan.⁴⁵

Demokrasi mendudukan rakyat sebagai raja dalam politik dan kuasa dalam memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara. Demokrasi adalah menerapkan hak-hak politik berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau menjalankan kedaulatan yang mutlak berada ditangan rakyat.⁴⁶

Selain itu istilah daulat (kedaulatan) juga dipergunakan secara historis untuk pengertian dinasti atau kurun waktu kekuasaan. Frase-frase seperti Daulat Umayyah, Daulat Abbasiyah, Daulat Fattimiyyah dan lain sebagainya. Hal ini dapat dipergunakan untuk menunjukkan pengertian Negara, Dinasti atau kerajaan.⁴⁷

Dari keterangan di atas, jelas bahwa pengertian kedaulatan dalam makna asalnya berkaitan erat dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi yang di dalamnya sekaligus terkandung dimensi waktu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah. Pandangan ini tercermin

misalnya dalam pemikiran Ibnu khaldun tentang naik dan tenggelamnya kekuasaan Negara-negara disepanjang sejarah umat manusia.⁴⁸

Dalam Islam kedaulatan hanyalah milik Tuhan karena tuhanlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, tuhan bukan saja sebagai pencipta tetapi tuhan juga sebagai pemelihara dan sumber hukum. Selain tuhan tidak ada yang berhak memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.⁴⁹

Dalam Islam siapa saja yang mendapatkan amanat untuk menduduki sesuatu jabatan kenegaraan, diawasi dan dikendalikan oleh rakyat yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam fungsinya sebagai khalifah tuhan. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia itu pada pokoknya hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT.⁵⁰

Negara itu sendiri diperlukan sebagai alat kehidupan bersama arga masyarakat yang diikat atas solidaritas bersama untuk bersama-sama dan sendiri-sendiri berlomba-lomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah tuhan. Dengan demikian, fungsi Negara sekedar menjadi alat bantu ini tidak boleh keluar dari kerangka hukum tuhan itu sendiri. Dalam hal ini, kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia (rakyat) itu haruslah mengikuti standar-standar yang yang ditentukan oleh hukum (kedaulatan hukum) yang ditentukan tuhan. Karena, kedaulatan rakyat itu hanyalah merupakan “cermin” dari kedaulatan yang hakiki, yaitu kedaulatan Allah SWT.⁵¹

Dalam pespektif Islam kedaulatan rakyat itu dapat dipahami terwujud dalam kekuasaan yang terkait dalam fungsi manusia (setiap pribadi rakyat) sebagai khalifah Allah. Kedaulatan tuhan itu dalam pelaksanaannya terwujud dalam kedaulatan rakyat yang akan memberikan amanat kepada para pemimpin yang dipilih oleh mereka sebagai mandataris, dan mengangkat “ahl halli wa al-aqli” ataupun “dewan syura” untuk menetapkan hukum Negara yang tidak dirumuskan berdasarkan rujukan syari’at ataupun dirumuskan dalam kerangka syariat tuhan.⁵²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia), h. 134

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...*, h. 132

⁴⁷ Yusdani, *Fiqh...*, h. 79

⁴⁸ Yusdani, *Fiqh...*, h. 79

⁴⁹ Yusdani, *Fiqh...*, 87

⁵⁰ Lihat Al-Quran surat ke 3 ayat 26.

⁵¹ Yusdani, *Fiqh...*, h. 88

⁵² Yusdani, *Fiqh...*, h. 91

kedaulatan rakyat dalam Islam yakni kedaulatan terletak hanya milik tuhan semata, namun dalam hal ini masyarakat juga memiliki kedaulatan yang mana kedaulatan tersebut merupakan titipan dari Tuhan, melalui kedaulatan rakyat ini lah manusia berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam memimpin Negara demi mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

D. Analisa Tentang Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta

Pemikiran Mohammad Hatta dalam melihat kemerdekaan dan kedaulatan rakyat yakni beliau sangat berjuang keras untuk mewujudkan itu semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun bila di tinjau dari perspektif Islam terkait masalah kemerdekaan dan kedaulatan rakyat maka akan kita temukan adanya keselarasan antara pemikiran Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan semangat kebangsaan, kemerdekaan bukan hanya sekedar terlepas dari jajahan bangsa luar saja, melainkan rakyat juga harus terlepas dari kekuasaan kaum feodal dan golongan yang ingin memanfaatkan rakyat Indonesia. Dalam pandangan Hatta kemerdekaan sesungguhnya harus diwujudkan melalui kesadaran kebangsaan, dan menyadari tentang arti kemerdekaan, dengan cara menjadikan diri dan rakyat menjadi orang-orang yang memiliki intelektual, sehingga tidak mudah untuk dibodohi. Dan hal ini bisa dilihat pada dalil Al-Quran bahwa kemerdekaan merupakan suatu bentuk pembebasan diri dari kesesatan, kebodohan dan berbagai bentuk penzaliman. Namun dalam konsep Islam semua bentuk kemerdekaan tersebut adalah campur tangan tuhan dan izin tuhan.

Keselarasan pemikiran ini dibuktikan dengan pembukaan undang-undang dasar Negara yang menyatakan bahwa berkat rahmat tuhanlah yang mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Artinya pemikiran Mohammad Hatta tentang kemerdekaan memang selaras dengan konsep kemerdekaan yang terdapat dalam Islam hal ini terlihat dari bagaimana Mohammad Hatta memaknai kemerdekaan dan menjaga/menghargai kemerdekaan dengan jalan terus berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan tidak

dibodohi oleh pihak manapun dengan tujuan mengambil keuntungan sendiri.

Kedaulatan dalam pandangan Mohammad Hatta yakni beliau senantiasa berbicara tentang arti penting pendidikan bagi rakyat, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat, agar rakyat mampu mengetahui hak dan kewajiban dan menggunakan secara bertanggung jawab. Begitulah Hatta yang menganggap pentingnya arti pendidikan bagi rakyat, dan Hatta juga menambahkan, tugas untuk mendidik rakyat berada di tangan para pemangku atau pejabat pemerintahan.

Agar para pejabat pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar Indonesia merdeka. Kebenaran di sini yaitu, dalam arti stabil dan kuat bertahan dalam menghadapi setiap gangguan inkonstitusional, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam hal inilah Hatta mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat.

Pertama, diasumsikan, disamping berdaulat, rakyat juga bertanggung jawab terhadap kedaulatan yang diembannya. Kedua, rakyat yang berdaulat tidak mungkin melucuti kedaulatan sendiri.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pemikiran Mohammad Hatta terkait dengan kedaulatan rakyat, menurut Hatta kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, karena kedaulatan merupakan milik rakyat maka rakyat harus diberikan pendidikan agar mereka tidak dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Dan masyarakat juga harus sadar akan pentingnya kedaulatan yang mereka miliki, dengan diberikan pendidikan kepada mereka maka mereka akan bisa mempertahankan dan menjunjung tinggi kedaulatan tersebut dan bukan melucuti dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Sedangkan dalam Islam Kedaulatan hanyalah milik Tuhan karena tuhanlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, tuhan bukan saja sebagai pencipta tetapi tuhan juga sebagai pemelihara dan sumber hukum. Selain tuhan tidak ada yang berhak memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.

Dalam Islam siapa saja yang mendapatkan

amanat untuk menduduki sesuatu jabatan kenegaraan, diawasi dan dikendalikan oleh rakyat yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam fungsinya sebagai khalifah tuhan. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia itu pada pokoknya hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT.

Negara itu sendiri diperlukan sebagai alat kehidupan bersama agar masyarakat yang diikat atas solidaritas bersama untuk bersama-sama dan sendiri-sendiri berlomba-lomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah tuhan. Dengan demikian, fungsi Negara sekedar menjadi alat bantu ini tidak boleh keluar dari kerangka hukum tuhan itu sendiri. Dalam hal ini, kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia (rakyat) itu haruslah mengikuti standar-standar yang yang ditentukan oleh hukum (kedaulatan hukum) yang ditentukan tuhan. Karena, kedaulatan rakyat itu hanyalah merupakan “cermin” dari kedaulatan yang hakiki, yaitu kedaulatan Allah SWT.

Dalam pespektif Islam kedaulatan rakyat itu dapat dipahami terwujud dalam kekuasaan yang terkait dalam fungsi manusia (setiap pribadi rakyat) sebagai khalifah Allah. Kedaulatan tuhan itu dalam pelaksanaannya terwujud dalam kedaulatan rakyat yang akan memberikan amanat kepada para pemimpin yang dipilih oleh mereka sebagai mandataris, dan mengangkat “ahl halli wa al-aqli” ataupun “dewan syura” untuk menetapkan hukum Negara yang tidak dirumuskan berdasarkan rujukan syari’at ataupun dirumuskan dalam kerangka syariat tuhan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat dalam Islam yakni kedaulatan terletak hanya milik tuhan semata, namun dalam hal ini masyarakat juga memiliki kedaulatan yang mana kedaulatan tersebut merupakan titipan dari Tuhan, melalui kedaulatan rakyat inilah manusia berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam memimpin Negara demi mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Dengan melihat konsep pemikiran Mohammad Hatta tentang kedaulatan rakyat yang lebih menegaskan tentang kekuasaan dalam bernegara adalah milik masyarakat maka dapat dikatakan bahwa keselarasan antara pemikiran Hatta dengan konsep Islam terkait kedaulatan rakyat

hanya berbeda dari cara melihat hakikat pemilik kekuasaan tersebut, karena dalam konsep Islam kekuasaan sesungguhnya dalam suatu Negara adalah Allah. Sedangkan Kedaulatan yang dimiliki oleh Masyarakat merupakan cerminan dari kekuasaan Allah.

Penutup

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemerdekaan menurut Mohammad Hatta yakni menghilangkan semua bentuk penjajahan dari suatu bangsa. Sedangkan kedaulatan rakyat dalam pandangannya, yakni kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat sehingga kedudukan rakyat sama dengan raja, hal tersebut bisa terwujud dengan cara melakukan pendidikan bagi rakyat agar rakyat sadar akan kedaulatan tersebut dan tidak akan pernah melucuti kedaulatan mereka sendiri, serta dengan masyarakat yang pandai tersebut tidak akan ada kelompok yang bisa melucuti dari kedaulatan rakyat tersebut.
2. Kemerdekaan dalam konsep Islam yakni pembebasan diri dari kebodohan, kesesatan dan kezhaliman dari penguasa. Sedangkan Kedaulatan rakyat dalam Islam yakni kedaulatan terletak hanya milik tuhan semata, namun dalam hal ini masyarakat juga memiliki kedaulatan yang mana kedaulatan tersebut merupakan titipan dari Tuhan, melalui kedaulatan rakyat inilah manusia berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam memimpin Negara demi mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.
3. Konsep pemikiran Mohammad Hatta tentang kemerdekaan dan kedaulatan rakyat memiliki keselarasan dengan konsep Islam terkait kemerdekaan pada intinya yang disebut dengan kemerdekaan yakni terlepasnya dari jajahan baik itu berupa kesesatan, kebodohan dan kezhaliman dari penguasa. Sedangkan kedaulatan rakyat sama saja hanya berbeda dari cara melihat hakikat pemilik kekuasaan tersebut, karena dalam konsep Islam kekuasaan sesungguhnya dalam suatu Negara adalah Allah. Sedangkan Kedaulatan yang dimiliki oleh Masyarakat merupakan cerminan dari kekuasaan Allah.

Daftar Pustaka

- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia
- A.H. Nasution, 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*. Bandung: Disjarah Angkatan darat dan Angkasa
- Abdu rrah matFathon i, 2006, *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RinekaCipta
- Ahmad Hakim, M. Thalhan, 2005, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka, Cet. I*; Yogyakarta: UII Press
- Anwar Saifuddin, 2009, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- AstimRiyanto, 2006, *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Bandung
- B. Setiawan, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Fiqh siyasah pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- DedeRosyada, dkk, 2000, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demikrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Cet. I*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Deliar Neor, 1990, *Biografi Politik Bung Hatta*, Jakarta : LP3ES
- Deliar Noer, 2012, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fujiachirusanto, 2002, “Perandan Sosok Bung Hatta dalam Dailetika Perkembangan Sejarah Bangsa Indonesia”, Semarang
- Hadiwijoyo, Sakti Suryo, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society, Cet. I*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Hamka, 1984, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Panjimas
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma
- Mohammad Hatta, 2014, *Demokrasi Kita*. Jakarta: Segi Arsy
- Mohammad Hatta, 2015, *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Mohammad Hatta, 2015, *Menuju Gerbang Kemerdekaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mohammad Hatta, 2010, *Berjuang dan Dibuang*, Jakarta: Kompas.

